



# **RENCANA KERJA**

## **INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

### **TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

JL. Sunan Giri No.2 Telp (0231)321643

SUMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Dokumen RENJA Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 memuat Lima bab, antara lain : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Tujuan dan Sasaran memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat serta Program dan Kegiatan. Rencana Kerja dan Pendanaan memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2022. Penutup memuat tentang ringkasan Renja serta langkah-langkah yang akan mengimplementasikan Renja Inspektorat Kabupaten Tahun 2022.

Dalam penyusunan renja Inspektorat Kabupaten Cirebon ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indicator kinerja Inspektorat untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Renja Inspektorat Kabupaten Cirebon ini diharapkan menjadi acuan bagi Inspektorat dan seluruh *stakeholder* Inspektorat untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Sumber, Oktober 2021

INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT  
Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si  
Perbina Utama Muda  
NIP. 19661209 199312 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020</b> .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon .....	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon .....	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat .....	41
3.3 Program dan Kegiatan .....	41
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	55

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;



33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009 – 2014;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon;
39. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
40. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dalam satu tahun ke depan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Terwujudnya aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
- c. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang berhasil agar lebih ditingkatkan lagi.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Inspektorat, proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, keterkaitan antara Rencana Kerja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat;

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang merupakan implementasi program kegiatan tahunan dari Renstra Inspektorat;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Susunan garis besar isi dokumen dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Inspektorat.

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi anggaran program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya;

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Berisi uraian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat;

#### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berikutnya.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Subbab ini berisi perumusan program dan kegiatan didasarkan atas faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Subbab ini berisi perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

#### **BAB V PENUTUP**

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

Evaluasi pelaksanaan perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Evaluasi dimaksud disusun untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2022.

Evaluasi Rencana Kerja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 melaksanakan 2 (dua) bidang urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) serta Urusan Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan.

Hasil evaluasi keuangan Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 23.156.377.400,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran
5.1.	Belanja Tidak Langsung	<b>14.228.808.000</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	14.228.808.000
5.2.	Belanja Langsung	<b>8.927.569.400</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	5.018.267.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.638.480.400
5.2.3.	Belanja Modal	270.822.000
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>23.156.377.400</b>

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.927.569.400 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.762.765.105 (enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau 75,75%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan;
  - 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralataan Kerja;
  - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan;
  - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
  - 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
  - 1) Pengadaan Meubeulair;
  - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; dan
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; dan
  - 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
  - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
  - 3) Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH (UPP Kab. Cirebon) Saber Pungli
  - 4) Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

- 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- 6) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
- 7) Pengendalian Manajemen kebijakan KDH - Bidang Pemerintahan
- 8) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
  - 1). Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (SPIP)

Adapun pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD sampai dengan dengan Bulan April Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23,225,719,574 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terealisasi sampai dengan Bulan April Tahun 2021 sebesar Rp. 4,612,757,851 (empat milyar enam ratus enam dua belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau 19.86%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 8) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 9) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 11) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 12) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 13) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - 14) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  - 15) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 16) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 17) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 18) Penyediaan Bahan/Material
  - 19) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 20) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 21) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 22) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 23) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 24) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 25) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 26) Pengadaan Mebel
  - 27) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 28) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 29) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 30) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 31) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 32) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 33) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
    - 1) Reviu Laporan Kinerja
    - 2) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 3) Reviu Laporan Keuangan
    - 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
    - 5) Pengawasan Desa
    - 6) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 7) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - 8) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
    - 3) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 4) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 5) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
    - 6) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi



Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021 disajikan dalam 2 (dua) tabel, terdiri dari :

Tabel 2.1        Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Tabel 2.1.1.    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Bulan April Tahun 2021

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Cirebon**

Instansi : Inspektorat Kabupaten Cirebon

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%
0.00.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Peningkatan Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	100	20.31	44.41	70.71	84.57	84.57	84.57	84.57
0.00.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening. (Satuan: jenis - Kumulatif)	15	0	3	0.75	0.75	0.75	0.50	2.75	2.75	18.33
0.00.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya. (Satuan: unit - Kumulatif)	305	0	61	0.17	9.83	31	2	43	43	14.10
0.00.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor. (Satuan: paket - Kumulatif)	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki. (Satuan: unit - Kumulatif)	210	0	42	9	19	13	1	42	42	20
0.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan. (Satuan: jenis - Kumulatif)	210	0	42	7	12	15	8	42	42	20
0.00.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. (Satuan: jenis - Kumulatif)	55	0	11	3	2.30	2.70	3	11	11	20
0.00.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan. (Satuan: jenis - Kumulatif)	40	0	8	2.06	1.94	2	2	8	8	20
0.00.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. (Satuan: unit - Kumulatif)	35	0	7	0	2	0	0	2	2	5.71

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaa n Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
						I	II	III	IV			
<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi</b>	<b>Realisasi Kinerja Pada Triwulan</b>				<b>Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi</b>	<b>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaa n Renja PD Thn 2020)</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12=5+11</b>	<b>13=12/4x100%</b>
0.00.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. (Satuan: jenis - Kumulatif)	15	0	3	0.75	0.75	0.75	0.50	2.75	2.75	18.33
0.00.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu. (Satuan: jamuan - Kumulatif)	100	0	20	7	2.80	7.20	3	20	20	20
0.00.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. (Satuan: laporan - Kumulatif)	150	0	30	8	4	3	4	19	19	12.67
0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	0	100	12.69	20.28	38.88	177.69	177.69	177.69	177.69
0.00.02.10.	Pengadaan Mebeleur	jumlah meubelair yang disediakan. (Satuan: unit - Kumulatif)	88	0	8	0	0	0	28	28	28	31.82
0.00.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas gedung kantor yang dipelihara. (Satuan: m2 - Kumulatif)	10000	0	2000	264	264	264	968	1760	1760	17.60
0.00.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. (Satuan: unit - Kumulatif)	305	0	61	15.25	5.75	26	11	58	58	19.02

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
						I	II	III	IV			
0.00.06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	100	67	67	67	81.69	81.69	81.69	81.69
0.00.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi belanja. (Satuan: dokumen - Kumulatif)	15	0	3	0	0	1	0.50	1.50	1.50	10
0.00.06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran. (Satuan: laporan - Kumulatif)	5	0	1	0	0	0.88	0.12	1	1	20
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	I	II	III	IV	11	12=5+11	13=12/4x100%
0.00.06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun. (Satuan: laporan - Kumulatif)	5	0	1	0.97	0	0	0.03	1	1	20
0.00.07.	<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor</b>	Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	100	0	0	0	17.24	17.24	17.24	17.24
0.00.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	tersusunnya dokumen perencanaan sektoral. (Satuan: dokumen - Kumulatif)	10	0	2	0	0	0	1	1	1	10
4.05.	<b>BIDANG URUSAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN</b>											

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
						I	II	III	IV			
4.05.20.	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)	100	0	100	19.18	47.18	65.51	102.80	102.80	102.80	102.80
4.05.20.01.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan/Monitoring. (Satuan: LHP - Kumulatif)	2900	0	580	122	228	74	126	550	550	18.97
4.05.20.02.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	jumlah laporan kasus di lingkungan Pemerintah Daerah. (Satuan: LHP - Kumulatif)	140	0	28	6	9	13	16	44	44	31.43
4.05.20.03.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	jumlah Laporan UPP Saber Pungli Kab. Cirebon untuk pengambilan keputusan pimpinan. (Satuan: laporan - Kumulatif)	5	0	1	0.07	0.12	0.14	0.47	0.80	0.80	16
4.05.20.04.	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	jumlah laporan kasus di lingkungan Pemerintah Daerah. (Satuan: LHP - Kumulatif)	114	0	14	3	6	5	20	34	34	29.82
4.05.20.06.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	hasil penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. (Satuan: LHP - Kumulatif)	2860	0	572	104	121	55	133	413	413	14.44
4.05.20.07.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	laporan koordinasi pengawasan. (Satuan: laporan - Kumulatif)	10	0	2	0.28	1.32	0.24	0.10	1.94	1.94	19.40
4.05.20.17.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Reviu Lap. Keuangan Pemda, Laporan Evaluasi LAKIP OPD, Reviu RKA dan Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. (Satuan: dokumen - Kumulatif)	20	0	4	2	0.40	0.10	0.30	2.80	2.80	14
<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)</b>	<b>Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun</b>	<b>Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-</b>	<b>Realisasi Kinerja Pada Triwulan</b>				<b>Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi</b>	<b>Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2020 (%)
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%
4.05.20.23.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan hasil aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. (Satuan: laporan - Kumulatif)	60	0	12	0.04	0.07	0	0.89	1	1	1.67
4.05.21.	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4.05.21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SDM aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu. (Satuan: persen - Kumulatif)	500	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4.05.22.	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	Meningkatnya persentase kualitas pengawasan (masih didiskusikan), (Satuan: nilai - Non Kumulatif Meningkatkan)	3.25	0	2.90	0	0	0.11	2.21	2.21	2.21	68
4.05.22.02.	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SKPD yang dinilai maturitas SPIP. (Satuan: SKPD - Kumulatif)	210	0	42	0	0	1.68	30.32	32	32	15.24

**Tabel 2.1.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2021**  
**Kabupaten Cirebon**

Instansi : Inspektorat Kabupaten Cirebon

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+11	13=12/4x100%
0.00.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	0	100	13.97	0	0	0	13.97	13.97	13.97
		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	0	100	11.84	0	0	0	11.84	11.84	11.84
		Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Persen	0	100	33.33	0	0	0	33.33	33.33	33.33
		Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Persen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD. (Satuan: Dok - Non Kumulatif)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	2 Dokumen	0	2	0	0	0	0	0	0	0



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Inspektorat	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi belanja	15 Dokumen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekon akuntansi bulanan, semesteran dan akhir tahun	12 Laporan	0	12	1.44	0	0	0	1.44	1.44	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	0	1	1	0	0	0	1	1	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	68 Pegawai	0	68	11.56	0	0	0	11.56	11.56	17
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon aset bulanan, semesteran dan akhir tahun	48 Laporan	0	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	96 Laporan	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	42 Jenis	0	40	9.60	0	0	0	9.60	9.60	22.86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2 Jenis	0	2	0.48	0	0	0	0.48	0.48	24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	49 Unit	0	8	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	27 Jamuan	0	12	3	0	0	0	3	3	11.11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	100 Jamuan	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	0	12	2.88	0	0	0	2.88	2.88	24

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190 Laporan	0	40	5.60	0	0	0	5.60	5.60	2.95
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	40 Jenis	0	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	80 Unit	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	9 Satuan	0	9	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan	20 Unit	0	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	3 Jenis	0	3	0.50	0	0	0	0.50	0.50	16.67
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	2000 m2	0	2000	280	0	0	0	280	280	14

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	61 Unit	0	55	12.10	0	0	0	12.10	12.10	19.84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	130 Unit	0	19	4.09	0	0	0	4.09	4.09	3.15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang diurus perijinannya	10 Unit	0	10	2	0	0	0	2	2	20
<b>6.01.02.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	100 Persen	0	100	15.61	0	0	0	15.61	15.61	15.61
<b>6.01.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Laporan Kerjasama Pengawasan Internal.	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	25 Laporan	0	6	0.98	0	0	0	0.98	0.98	3.92
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	768 LHP	0	44	0.30	0	0	0	0.30	0.30	0.04
	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	16 Laporan	0	4	1.76	0	0	0	1.76	1.76	11
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2238 LHP	0	556	0	0	0	0	0	0	0
	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan	2120 LHP	0	424	0.10	0	0	0	0.10	0.10	0
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan	884 LHP	0	96	46	0	0	0	46	46	5.20

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
<b>6.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>											
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	60 LHP	0	60	0.20	0	0	0	0.20	0.20	0.33
		Laporan Probit Audit.	4 Dokumen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	10 Dokumen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.01.03.</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	100 Persen	0	100	11.83	0	0	0	11.83	11.83	11.83
		Meningkatnya persentase kualitas pengawasan,	3.25 Nilai	0	3	0.20	0	0	0	0.20	0.20	6.15
		persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten	100 Persen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.01.03.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>											
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Gelarwasda, Rakorwasda dan Rakorwasnas	1 Dokumen	0	1	0.35	0	0	0	0.35	0.35	35
		Laporan hasil aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	60 Laporan	0	12	0	0	0	0	0	0	0

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d Rencana Kerja Thn Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD Thn berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (Akhir Thn Pelaksanaan Rencana Kerja PD Thn 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Thn 2021 (%)
						I	II	III	IV			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	500 Persen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.01.03.2.02.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>											
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai maturitas SPIP	42 SKPD	0	42	5.04	0	0	0	5.04	5.04	12
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan Kegiatan UPP SABER PUNGLI	1 Dokumen	0	1	0.01	0	0	0	0.01	0.01	1
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen hasil survey penilaian integritas (SPI)	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kegiatan Penilaian Internal Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0	1	0.01	0	0	0	0.01	0.01	1

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renstra Inspektorat Kabupaten Cirebon sesuai tabel 2.1 diatas, untuk Urusan Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan telah memiliki program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2024, masih disebut wajar sesuai dengan pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Inspektorat yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1.2.  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Bulan Desember Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	<b>8.927.569.400</b>	<b>6.762.765.105</b>	<b>(2.164.804.295)</b>	<b>75,75%</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.927.569.400</b>	<b>6.762.765.105</b>	<b>(2.164.804.295)</b>	<b>75,75%</b>
<b>BELANJA NON URUSAN</b>	<b>1.317.446.000</b>	<b>1.247.914.553</b>	<b>(69.531.447)</b>	<b>94,72%</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>706.712.000</b>	<b>684.482.386</b>	<b>(22.229.614)</b>	<b>96,85%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	124.726.918	(13.273.082)	90,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	21.500.000	18.092.900	(3.407.100)	84,15%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralataan Kerja	13.750.000	13.631.000	(119.000)	99,13%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.200.000	35.200.000	-	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.400.000	33.363.500	(36.500)	99,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	8.800.000	8.800.000	-	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.062.000	297.263.500	(2.798.500)	99,07%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	33.540.000	(2.460.000)	93,17%
Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	20.000.000	-	100,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	99.864.568	(135.432)	99,86%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>532.524.000</b>	<b>516.518.767</b>	<b>(16.005.233)</b>	<b>96,99%</b>
Pengadaan Meubelair	51.360.000	49.940.000	(1.420.000)	97,24%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	211.146.000	196.698.767	(14.447.233)	93,16%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	270.018.000	269.880.000	(138.000)	99,95%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>53.879.000</b>	<b>35.041.000</b>	<b>(18.838.000)</b>	<b>65,04%</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.465.000	16.943.000	(18.522.000)	47,77%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7.414.000	7.349.400	(64.600)	99,13%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	11.000.000	10.748.600	(251.400)	97,71%
<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral</b>	<b>24.331.000</b>	<b>11.872.400</b>	<b>(12.458.600)</b>	<b>48,80%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	24.331.000	11.872.400	(12.458.600)	48,80%
<b>BELANJA NON URUSAN</b>	<b>7.610.123.400</b>	<b>5.514.850.552</b>	<b>(2.095.272.848)</b>	<b>72,47%</b>
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>7.391.075.100</b>	<b>5.445.596.325</b>	<b>(1.945.478.775)</b>	<b>73,68%</b>
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	3.733.961.600	2.533.692.600	(1.200.269.000)	67,86%
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	495.658.600	495.143.000	(515.600)	99,90%
Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH (UPP Kab. Cirebon) Saber Pungli	383.087.600	376.336.200	(6.751.400)	98,24%
Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	429.359.800	420.924.100	(8.435.700)	98,04%
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1.192.220.100	936.613.400	(255.606.700)	78,56%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	46.187.200	45.165.425	(1.021.775)	97,79%
Pengendalian Manajemen kebijakan KDH - Bidang Pemerintahan	1.048.033.200	581.847.600	(466.185.600)	55,52%
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	62.567.000	55.874.000	(6.693.000)	89,30%
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	-	-	-	
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			-	
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>219.048.300</b>	<b>69.254.227</b>	<b>(149.794.073)</b>	<b>31,62%</b>
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (SPIP)	219.048.300	69.254.227	(149.794.073)	31,62%

Sesuai hasil evaluasi kinerja Tahun 2020 yang diuraikan pada Tabel 2.1.2 diatas, maka capaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebesar 75,75%.

Tabel 2.1.3.  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Bulan April Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>23,225,719,574</b>	<b>4,612,757,851</b>	<b>18,612,961,723</b>	<b>19.86%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16,508,756,074</b>	<b>3,770,227,422</b>	<b>12,738,528,652</b>	<b>22.84%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Sub Kegiatan)</b>	<b>14,528,100</b>	<b>2,870,500</b>	<b>11,657,600</b>	<b>19.76%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,854,000	-	3,854,000	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,269,600	-	3,269,600	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,779,500	-	1,779,500	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,625,000	2,870,500	2,754,500	51.03%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4 Sub Kegiatan)</b>	<b>15,626,003,800</b>	<b>3,556,151,886</b>	<b>12,069,851,914</b>	<b>22.76%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,610,743,000	3,551,478,486	12,059,264,514	22.75%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,281,500	756,000	5,525,500	12.04%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,970,000	3,917,400	52,600	98.68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5,009,300	-	5,009,300	0.00%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Sub</b>	<b>5,380,000</b>	<b>-</b>	<b>5,380,000</b>	<b>0.00%</b>

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
<b>Kegiatan)</b>				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,380,000	-	5,380,000	0.00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (8 Sub Kegiatan)</b>	<b>248,366,950</b>	<b>58,963,400</b>	<b>189,403,550</b>	<b>23.74%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,916,000	1,582,600	6,333,400	19.99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,889,000	-	25,889,000	0.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,000,000	5,760,000	12,240,000	32.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,025,600	9,936,100	20,089,500	33.09%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,997,000	11,920,000	24,077,000	33.11%
Penyediaan Bahan/Material	29,766,000	9,626,700	20,139,300	32.34%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,879,750	18,862,000	77,017,750	19.67%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,893,600	1,276,000	3,617,600	26.07%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1 Sub Kegiatan)</b>	<b>37,226,000</b>	<b>-</b>	<b>37,226,000</b>	<b>0.00%</b>
Pengadaan Mebel	37,226,000	-	37,226,000	0.00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Sub Kegiatan)</b>	<b>144,599,424</b>	<b>35,437,812</b>	<b>109,161,612</b>	<b>24.51%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144,599,424	35,437,812	109,161,612	24.51%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 Sub Kegiatan)</b>	<b>432,651,800</b>	<b>116,803,824</b>	<b>315,847,976</b>	<b>27.00%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,820,000	27,414,200	69,405,800	28.31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219,140,000	66,043,800	153,096,200	30.14%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,710,000	3,340,000	9,370,000	26.28%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103,981,800	20,005,824	83,975,976	19.24%
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>4,813,438,100</b>	<b>706,578,000</b>	<b>4,106,860,100</b>	<b>14.68%</b>
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6 Sub Kegiatan)</b>	<b>3,494,517,800</b>	<b>643,882,700</b>	<b>2,850,635,100</b>	<b>18.43%</b>
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	409,990,200	8,060,000	401,930,200	1.97%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	269,963,400	188,872,800	81,090,600	69.96%
Reviu Laporan Kinerja	564,448,400	104,656,900	459,791,500	18.54%
Reviu Laporan Keuangan	243,410,300	142,101,800	101,308,500	58.38%
Pengawasan Desa	996,407,500	126,274,800	870,132,700	12.67%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1,010,298,000	73,916,400	936,381,600	7.32%
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal (1 Sub Kegiatan)</b>	<b>1,318,920,300</b>	<b>62,695,300</b>	<b>1,256,225,000</b>	<b>4.75%</b>
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,318,920,300	62,695,300	1,256,225,000	4.75%
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>1,903,525,400</b>	<b>135,952,429</b>	<b>1,767,572,971</b>	<b>7.14%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (2 Sub Kegiatan)</b>	<b>151,039,100</b>	<b>39,237,689</b>	<b>111,801,411</b>	<b>25.98%</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	114,805,600	39,237,689	75,567,911	34.18%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	36,233,500	-	36,233,500	0.00%
<b>Pendampingan dan Asistensi (4 Sub Kegiatan)</b>	<b>1,752,486,300</b>	<b>96,714,740</b>	<b>1,655,771,560</b>	<b>5.52%</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1,061,483,900	57,426,740	1,004,057,160	5.41%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	104,657,200	294,000	104,363,200	0.28%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	436,345,200	38,994,000	397,351,200	8.94%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	150,000,000	-	150,000,000	0.00%

Sesuai hasil evaluasi kinerja seperti yang diuraikan pada Tabel 2.1.3 diatas, maka capaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sampai dengan Bulan April sebesar 19,86%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas maka capaian kinerja pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dapat dilihat berdasarkan Tabel. 2.2. sebagai berikut :

**Tabel. 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Inspektorat Kabupaten Cirebon**  
**(Triwulan I Tahun 2021)**

No	Indikator/Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di 32 SKPD dan 40 Kecamatan dengan target	2,80	2,90	3	3,10	1,6	-	3,00	3,15	
		Meningkatnya Laporan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dengan kategori "BB" disertai dengan LHR Reviu Keuangan SKPD, Laporan Peningkatan Kapabilitas APiP, Laporan Unit Pengendali Gratifikasi sesuai ketentuan (jumlah SKPD dan Kecamatan 73)	10 SKPD	13 SKPD	16 SKPD	19 SKPD	10 SKPD	13 SKPD	16 SKPD	19 SKPD	
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	60%	65%	70%	75%	60%	65%	70%	75%	
		Meningkatnya Laporan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Prosentasi penguatan pencegahan korupsi	60%	65%	70%	75%	60%	65%	70%	75%	
		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Barjas, LHA Kinerja untuk perbaikan Audit	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	568 Obrik	
		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pemda/ASN yang diadakan (13.172 ASN)	26 LHP	26 LHP	28 LHP	28 LHP	26 LHP	26 LHP	28 LHP	28 LHP	
		Laporan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Cirebon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
		Laporan kasus perdesaan sebagai bahan keputusan pimpinan	34 Desa	34 Desa	34 Desa	34 Desa	34 Desa	34 Desa	34 Desa	34 Desa	
	Laporan TLHP Internal dan Eksternal untuk										

No	Indikator/Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
		perbaikan auditan	568 Lap	568 Lap	568 Lap	568 Lap	568 Lap	568 Lap	568 Lap	568 Lap	
		Laporan koordinasi agar pengawasan tidak tumpang tindih	84,00	85,00	86,00	87,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya biaya penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya biaya perijinan dan pajak kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa perbaikan dan peralatan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Komponen alat listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Peralatan perkantoran penunjang pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Bahan bacaan dan buku-buku literatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dokumen koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mebeleur kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	100%	-	-	-	100%	-	-	
		Dokumen LAKIP Inspektorat dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dokumen laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Dokumen perencanaan sektoral rencana jangka menengah dan penyusunan RKA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Cirebon tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (*welfare state*).

Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Rencana Kerja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Melaksanakan pemeriksaan reguler, pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan khusus terhadap Perangkat Daerah (PD) yang strategis yaitu instansi-instansi penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah);
2. Melakukan pembinaan kepada aparatur PD atau desa untuk melaksanakan tata kelola administrasi umum maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mendorong kepada PD dan desa agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Meminimalisir terhadap kegiatan-kegiatan PD yang berindikasi dapat merugikan keuangan daerah/negara;

5. Meningkatkan kualitas pengawasan maupun pemeriksaan agar Laporan Hasil Pemeriksaan dapat digunakan oleh Bupati atau pihak berwajib sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan;
6. Membina SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon baik melalui diklat formal sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat P2UPD, diklat Ketua Tim, maupun bimbingan teknis dengan materi yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, BPK-RI Perwakilan di Bandung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar pemeriksaan lebih efektif dan berhasil guna;
8. Mendorong terbentuknya Satuan Tugas SPIP pada setiap PD agar berfungsi dengan baik;
9. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan menjalin komunikasi dengan obyek pemeriksa agar meningkatkan kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu;
10. Bersama dengan PD yang lain mengupayakan agar Opini WTP dari BPK dapat dicapai;
11. Membentuk Satgas OTT tingkat Kabupaten Cirebon agar kegiatan yang bersifat KKN dapat diminimalisir.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah:

1. Faktor penghambat:
  - a. Fungsi pendampingan yang masih belum optimal;
  - b. Belum tersedianya anggaran peningkatan SDM pengawasan;
  - c. Belum tersedianya kebijakan standarisasi ISO dalam manajemen SDM pengawasan.
2. Faktor pendorong:
  - a. Jumlah jabatan fungsional yang sudah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sudah tersertifikasi;
  - b. Jumlah anggaran yang dapat dipenuhi menyesuaikan dengan kebutuhan belanja.

## **Upaya-upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang:**

### **1. Peningkatan Kinerja yang Telah Dicapai**

1.1 Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemberantasan Korupsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

- a) Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Bupati sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b) Menyusun dan merumuskan pembentukan Lembaga Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- c) Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas;

1.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

- a) Peningkatan bimbingan teknis dan diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat;
- b) Merumuskan dan menetapkan kode etik bagi auditor dan tenaga pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

1.3 Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai PD Khusus

- a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor melalui kebijakan Remunerasi berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;
- b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan

perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);

- f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas;
- g) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal;
- h) Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO 9001 : 2000;

#### 1.4 Kontribusi terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Tindak Lanjut Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon

- a) Menyusun sistem dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam program reformasi birokrasi;
- b) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
  - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
  - Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

#### 2. Peningkatan Kinerja yang Akan Dicapai

- a) Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Cirebon 2009-2014.
- b) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- d) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- e) Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi:
  - 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari:
    - a. Hasil Pemeriksaan/Audit Operasional;

- b. Hasil Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu;
  - c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal dan Eksternal.
2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :
- a. Pengaduan masyarakat;
  - b. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- f) Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO 9001: 2000 di Lingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- g) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- h) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
- 1. Tunjangan kelangkaan profesi;
  - 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
  - 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
  - 4. Penanganan pengaduan;
  - 5. Pemeriksaan/Audit dengan tujuan tertentu atau Pemeriksaan/Audit Operasional.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.3.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2014 hingga tahun 2019, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013. Serta dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Cirebon.

Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Cirebon tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Cirebon selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun anggaran.

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Cirebon yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus. Berdasarkan hal itu maka peraturan perundangan yang berkaitan



dengan susunan organisasi dalam proses revisi yang disesuaikan dengan kedua peraturan perundangan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Program Pusat adalah:

1. UPP Saber Pungli
2. Unit Pengendalian Gratifikasi
3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Monitoring Center for Prevention (MCP)
4. Peningkatan SPIP
5. Kapabilitas APIP
6. TLHP Eksternal/BPK

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat**

#### **3.2.1. Tujuan :**

Tujuan Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **3.2.2. Sasaran :**

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi, dengan indikator kinerja nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Program**

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan diatas, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja-SKPD. Rancangan Rencana Kerja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan

alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Terdapat 3 program yang digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

### 3.3.2. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang selaras dengan program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat
  - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 9) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 10) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 11) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 12) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - 13) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 14) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - 15) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 16) Pengamanan Barang milik Daerah SKPD
  - 17) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 18) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 19) Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 20) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 21) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 22) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 23) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 24) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 25) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 26) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 27) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 28) Sosialisasi Aturan Perundang-undangan
- 29) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 30) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 31) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 32) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 33) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 34) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 35) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 36) Penyediaan Bahan/Material
- 37) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 38) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 39) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 40) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 41) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 42) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 43) Pengadaan Mebel
- 44) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 45) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 46) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 47) Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 48) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 49) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 50) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 51) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 52) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 53) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 54) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 55) Pemeliharaan Mebel
  - 56) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 57) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - 58) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 59) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 60) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
    - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3) Reviu Laporan Kinerja
    - 4) Reviu Laporan Keuangan
    - 5) Pengawasan Desa
    - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
    - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
    - 8) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 9) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
    - 3) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 4) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 5) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 6) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

**Tabel 2.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Cirebon**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0.00.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat	100 Prosen	21,771,834,840	APBD		100 Prosen	22,784,521,247
		Meningkatnya persentase sarana dan prasarana aparatur	Inspektorat	100 Prosen		APBD		100 Prosen	
		Meningkatnya persentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Inspektorat	100 Prosen		APBD		100 Prosen	
		Meningkatnya persentase sistem perencanaan sektoral yang transparan, akuntabel dan informatif	Inspektorat	100 Prosen		APBD		100 Prosen	
<b>0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Inspektorat		103,578,240	APBD			116,854,344
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral	Inspektorat	2 Dok	17,453,040	APBD		2 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	1 Dok	3,923,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	2,135,400	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Inspektorat	1 Dok	4,657,300	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	6,465,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja	Inspektorat	3 Dok	48,400,000	APBD		3 Dok	
0.00.01.2.01.01.	Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat	Inspektorat	1 Dok	20,543,500	APBD		1 Dok	
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Inspektorat		16,116,902,250	APBD			16,919,148,603
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan	Inspektorat	68 Pegawai	15,999,859,050	APBD		68 Pegawai	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		tunjangan setiap bulan							
0.00.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	12 Dok	54,735,500	APBD		12 Dok	
0.00.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekon akuntansi bulanan, semesteran dan akhir tahun	Inspektorat	12 Laporan	7,600,700	APBD		12 Laporan	
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Inspektorat	1 Laporan	14,520,000	APBD		1 Laporan	
0.00.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	1 Dok	14,753,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Inspektorat	1 Laporan	9,680,000	APBD		1 Laporan	
0.00.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	1 Dok	15,753,500	APBD		1 Dok	
<b>0.00.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Inspektorat		55,935,800	APBD		75,403,800	
0.00.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	1 Dok	6,750,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.03.02.	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	Inspektorat	10 Unit	5,675,000	APBD		10 Unit	
0.00.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dilakukan appraisal (penilaian)	Inspektorat	10 Unit	7,800,500	APBD		10 Unit	
0.00.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	1 Dok	15,875,000	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.03.05.	Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Barag Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat	1 Dok	4,575,000	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekon aset bulanan, semesteran dan akhir tahun	Inspektorat	12 Laporan	6,509,800	APBD		12 Laporan	
0.00.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat	1 Dok	8,750,000	APBD		1 Dok	
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>		Inspektorat		666,686,500	APBD		721,501,300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Perangkat Daerah</b>								
0.00.01.2.05.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Inspektorat	Inspektorat	1 Unit	10,350,000	APBD		1 Unit	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	75 Stel	40,000,000	APBD		80 Stel	
0.00.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	1 Dok	17,500,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Inspektorat	1 Dok	25,850,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat	1 Dok	7,850,500	APBD		1 Dok	
0.00.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Inspektorat	45 Pegawai	153,850,000	APBD		45 Pegawai	
0.00.01.2.05.11.	Sosialisasi Aturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	150 orang	175,835,000	APBD		150 orang	
0.00.01.2.05.10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	150 orang	235,450,000	APBD		150 orang	
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Inspektorat		1,474,010,600	APBD		1,497,920,600	
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Inspektorat	8 jenis	10,648,000	APBD		8 jenis	
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Inspektorat	10 unit	605,000,000	APBD		12 unit	
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Inspektorat	12 unit	75,850,500	APBD		12 unit	
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Inspektorat	17 jamuan	21,780,000	APBD		22 jamuan	
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Inspektorat	12 jenis	40,414,000	APBD		12 jenis	
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	2 jenis	48,024,000	APBD		2 jenis	
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Inspektorat	42 jenis	42,592,000	APBD		42 jenis	
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Inspektorat	20 jamuan	19,965,000	APBD		20 jamuan	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	40 laporan	153,065,000	APBD		40 laporan	
0.00.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	Inspektorat	24 laporan	5,921,300	APBD		24 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SKPD								
0.00.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat	1 dok	450,750,800	APBD		1 dok	
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Inspektorat		2,185,942,650	APBD		2,222,824,300	
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	9 dok	500,700,000	APBD		9 dok	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pengawasan	Inspektorat	20 unit	590,550,000	APBD		20 unit	
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Inspektorat	20 unit	247,566,000	APBD		20 unit	
0.00.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Inspektorat	1 unit	45,750,450	APBD		1 unit	
0.00.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	5 unit	45,750,850	APBD		5 unit	
0.00.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan	Inspektorat	1 bangunan	570,675,000	APBD		1 bangunan	
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 unit	137,450,000	APBD		1 unit	
0.00.01.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	47,500,350	APBD		1 dok	
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Inspektorat		540,301,500	APBD		571,304,500	
0.00.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang terdistribusikan	Inspektorat	750 dok	65,750,500	APBD		750 dok	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	Inspektorat	3 jenis	181,500,000	APBD		3 jenis	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	1 paket	135,700,500	APBD		1 paket	
0.00.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	1 paket	157,350,500	APBD		1 paket	
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		Inspektorat		628,477,300	APBD		659,563,800	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Daerah</b>								
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus perijinannya	Inspektorat	10 unit	117,152,200	APBD		10 unit	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan jumlah kendaraan yang diurus pajak kendaraannya	Inspektorat	61 unit	24,200,000	APBD		61 unit	
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	1 dok	47,500,500	APBD		1 dok	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	Inspektorat	21 unit	15,379,100	APBD		23 unit	
0.00.01.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Inspektorat	1 dok	75,650,500	APBD		1 dok	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat	2000 m2	157,300,000	APBD		2000 m2	
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	53,750,000	APBD		1 dok	
0.00.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	1 dok	137,545,000	APBD		1 dok	
<b>6.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Inspektorat		17,438,842,260	APBD		19,209,942,947	
<b>6.01.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		Inspektorat			APBD			
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	100 prosen	13,559,146,490	APBD		100 prosen 14,986,984,707	
6.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat		13,018,179,890	APBD		14,426,089,307	
6.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	Inspektorat	46 LHP	6,516,913,348	APBD		48 LHP	
6.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu	Inspektorat	77 LHP	3,409,464,512	APBD		79 LHP	
6.01.02.2.01.05.	Pengawasan Desa	Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	6 laporan	911,930,880	APBD		6 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.01.02.2.01.06.	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	4 laporan	380,000,000	APBD		4 laporan	
6.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektorat	424 LHP	1,228,470,650	APBD		424 LHP	
<b>6.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>		Inspektorat	1 dok	235,750,000	APBD		1 dok	
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	556 LHP	335,650,500	APBD		556 LHP	
		Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat		540,966,600	APBD			560,895,400
6.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Inspektorat	1 dok	254,375,000	APBD		1 dok	
		Laporan Proby Audit	Inspektorat	10 dok		APBD		10 dok	
<b>6.01.03.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentasi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Inspektorat	60 LHP	286,591,600	APBD		60 LHP	
		Meningkatnya persentase kualitas pengawasan	Inspektorat	4 dok		APBD		4 dok	
		Persentasi Peningkatan SDM Pengawas berkompeten	Inspektorat	100 Prosen	3,879,695,770	APBD		100 Prosen	4,222,958,240
<b>6.01.03.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>		Inspektorat	3,1 nilai		APBD		3,15 nilai	
6.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Gelarwasda, Rakorwasda dan Rakorwasnas	Inspektorat	100 prosen		APBD		100 prosen	
		Laporan hasil aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat		2,471,065,270	APBD			2,696,434,840
6.01.03.2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	1 dok	1,986,265,270	APBD		1 dok	
<b>6.01.03.2.02.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		Inspektorat	12 laporan		APBD		12 laporan	
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang dinilai maturitas SPIP	Inspektorat	100 persen	484,800,000	APBD		100 persen	
6.01.03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Kegiatan Penilaian Internal Reformasi Birokrasi	Inspektorat		1,408,630,500	APBD			1,526,523,400
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Dokumen Laporan Kegiatan UPP SABER PUNGLI	Inspektorat	42 SKPD	607,686,200	APBD		42 SKPD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemberantasan Korupsi								
6.01.03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen hasil survey penilaian integritas (SPI)	Inspektorat	1 dok	102,008,600	APBD		1 dok	
	<b>JUMLAH</b>				<b>39,210,677,100</b>			<b>41,994,464,194</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2022 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,453,040
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	3,923,500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,135,400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,657,300
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,465,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,400,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat	20,543,500
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,999,859,050
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54,735,500
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,600,700
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,520,000
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14,753,500
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9,680,000
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,753,500
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6,750,500
16	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	5,675,000
17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7,800,500
18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15,875,000
19	Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,575,000
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,509,800
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8,750,000
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10,350,000
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000
24	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17,500,500
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25,850,500
26	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,850,500
27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153,850,000
28	Sosialisasi Aturan Perundang-undangan	175,835,000
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	235,450,000
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,648,000
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605,000,000
32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,850,500
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,780,000
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,414,000
35	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48,024,000
36	Penyediaan Bahan/Material	42,592,000
37	Fasilitas Kunjungan Tamu	19,965,000
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,065,000
39	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,921,300
40	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450,750,800

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
NO	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
41	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500,700,000
42	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	590,550,000
43	Pengadaan Mebel	247,566,000
44	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,750,450
45	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	45,750,850
46	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570,675,000
47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,450,000
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,500,350
49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65,750,500
50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,500,000
51	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,700,500
52	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157,350,500
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,152,200
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,200,000
55	Pemeliharaan Mebel	47,500,500
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,379,100
57	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75,650,500
58	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157,300,000
59	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,750,000
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,545,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6,516,913,348
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3,409,464,512
3	Reviu Laporan Kinerja	911,930,880
4	Reviu Laporan Keuangan	380,000,000
5	Pengawasan Desa	1,228,470,650
6	Kerjasama Pengawasan Internal	235,750,000
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	335,650,500
8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	254,375,000
9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	286,591,600
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1,986,265,270
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	484,800,000
3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	607,686,200
4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	102,008,600
5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	523,614,200
6	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	175,321,500

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Cirebon sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Cirebon yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi, mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.